yang dapat diilustrasikan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari...

Quick Count di Jawa dan Harapan Publik Jateng

BERDASARKAN hasil *quick count* (perhitungan cepat), Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, khususnya di Jawa sangat menarik untuk disimak. Pertama, Pilkada Jawa Barat, akhirnya pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum unggul dengan suara 32,54 persen, disusul Sudrajat dan Ahmad Syaikhul 29,53 persen, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi memperoleh suara 25,72 persen dan terakhir, Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan, memperoleh suara 12,20 persen. (Litbang Kompas, 27/6/2018).

Kedua, di Jawa Timur, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak yang didukung Demokrat, Nasdem, PAN, Hanura, Golkar, PPP unggul dengan suara 53,63 persen. Disusul pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno yang didukung PDI-P, Gerindra, PKB dan PKS itu memperoleh suara 46,37 persen. (Indikator Politik Indonesia, 27/6/2018).

Ketiga, di Jawa Tengah (Jateng), pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin unggul dengan atas pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziyah. Di Jawa Tengah, bermacam-macam lembaga survei, juga menyebut bahwa pasangan nomor 1 unggul melalui hitung cepat, diantaranya survei dari SMRC menyebut bahwa paslon 1 memperoleh suara 58,58 persen, sedangkan paslon 2 memperoleh suara 41,42 persen. paslon. LSI menyebut untuk paslon 1 memperoleh suara 58,79 persen, sedangkan paslon 2 memperoleh suara 41,21 persen. Kompas menyebut untuk paslon 1 memperoleh suara 58,34 persen, sedangkan paslon 2 mendapat suara 41,66 persen. Indo-

Barometer menyebut paslon 1 memperoleh 56,74 persen, sedangkan paslon 2 memperoleh 43,26 persen.

Siapapun yang nantinya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa, (Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah) dalam Pemilu 2018, kita tetap menunggu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan dari penyelenggara pemilu. Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rekapitulasi hasil suara hingga 9 Juli 2018.

Mengutip yang disampaikan Sunarto Ciptoharjonodari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), bahwa hasil hitung cepat LSI di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018 menempatkan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin memperoleh 58,28% suara. Ada pun pesaingnya Sudirman Said-Ida hanya mendapatkan 41,72%. Artinya, ada hal yang menarik dari hasil hitung cepat, menyebutkan bahwa tingkat partisipasi pemilu mencapai 64,60%. Angka golput sebesar 35,40%, artinya angka yang tidak menggunakan hak pilih turun dibandingkan periode Pilgub sebelumnya.

Bagi penulis, angka golput tetap masih tinggi di Jawa Tengah, maka terkait domain tugas KPU Tengah sebagai penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah, ada beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki. Salah satunya sosialisasi pilgub yang dirasakan belum menyentuh akar rumput sampai tingkat RT/RW. Pelaksanaan sosialisasi lebih sering bersifat eksklusif, artinya pelaksanaan sosialisasi dilakukan terbatas di kalangan komunitas tertentu.

Padahal jauh sebelumnya, ber-

bagai tahapan dalam pemilu sudah dijadwalkan oleh KPU. Permasalahan teknis ini merupakan kelemahan yang pada akhirnya akan memicu ketidakpuasan dari partai politik, kandidat, dan masyarakat. Mereka menginginkan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada KPU benar-benar dijalankan sebagai amanah, profesional, penuh keterbukaan dan pertanggungjawaban. Seperti diketahui bahwa dana Pemilu Jawa Tengah berasal dari APBD dengan jumlah berkisar Rp 992 miliar (Detiknews, 22 Agustus 2017), artinya uang tersebut berasal dari uang pajak masyarakat yang harus dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab.

Adapun jika terjadi permasalahan terkait dengan sengketa Pemilu, publik berharap, bahwa cara penyelesaian lebih senang melihat dengan mengedepankan penegakan hukum, ketimbang cara-cara pengerahan massa. Kita percaya pemimpin parpol, kandidat, dan elit politik dapat menahan diri sehingga menjadi pembelajaran politik yang berharga bagi masyarakat.

Harapan publik

Pesta demokrasi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah telah usai versi hitung cepat, yang menang tidak jomawa yang kalah pun terhormat karena dipilih oleh rakyat. Namun tentunya

bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih, amanah yang diberikan dari penduduk Jawa Tengah harus dijawab dengan pasti. Bukan

hanya sebatas janji politik sewaktu berlangsungnya kampanye. Berbagai persoalan mendasar yang perlu perhatian adalah membawa penduduk Jawa Tengah ke arah yang lebih baik lagi mengurangi kemiskinan dengan tersedianya lapangan pekerjaan mengeliminasi kasus trafficking, kemudahan mer-

cepat pelayanan kesehatan, pendidikan yang bermutu, serta perbaikan sosial lainnya. Dengan demikian cita-

cita menjadikan penduduk Jawa Tengah yang santun, sejahtera, serta hidup semakin bahagia benar-benar dapat dirasakan.

Terkait tata kelola lingkungan seperti kerusakan alam, banjir dan lainnya perlu penataan secara bertanggung jawab, perundangan dan peraturan yang sudah ada segera dilaksanakan. Kemudian yang tak kalah penting dalam roda pemerintahan, publik berharap tidak ada lagi kesenjangan antara gubernur dan wakil gubernur, khususnya dalam pembagian tugas. Selama ini ada anggapan bahwa tugas wakil gubernur hanya batas ban serep, sehingga berujung konflik. Pada akhirnya mengganggu roda pemerintahan. Semoga kondisi tidak terjadi di Jawa Tengah.

NANANG QOSIM

KOLUMNIS DAN PENELITI, PENGURUS LAJINAH TALIF WAN NASYR (LTN) NU SEMARANG